Undang undang yang mengatur ekonomian dan perekonomian yang dibuat negara

Padahal, UUD 1945 menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](http://kompas.com/) dengan judul "Kembali ke Pasal 33 UUD 1945", <https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945?page=all>.

Cari struktur badan organisasi di kementrian BUMN

<http://bumn.go.id/halaman/0-Bagan-Organisasi-Kementerian-BUMN>

komisi DPR RI yang menangani BUMN

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang.

Pada DPR Periode 2019-2024 telah ditetapkan jumlah Komisi sebanyak 11 (sebelas) Komisi. H al ini berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Oktober 2019. Salah satu Komisi yang ada di DPR adalah **Komisi VI.**Berikut ini selayang pandang mengenai Komisi VI DPR RI.

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VI>

https://katadata.co.id/berita/2017/09/27/masalah-keuangan-pln-dikhawatirkan-bisa-pengaruhi-rating-utang-ri

https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-bumn-atasi-rugi-kurs-pln-harus-kelola-keuangan